

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perusahaan *go public* memerlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. *Good corporate governance* merupakan konsep yang menekankan pada hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat, benar dan tepat waktu. Selain itu, konsep ini juga menunjukkan tentang kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan informasi keuangan kepada seluruh pemilik kepentingan secara akurat, tepat waktu dan transparan (Darmawati, 2004).

Isu terbesar tentang *good corporate governance* terjadi pada kasus Enron di Amerika Serikat. Pada kasus tersebut, pihak manajemen Enron melakukan *window dressing* pada laporan keuangan dengan cara melakukan *mark up* laba sebesar US\$600 juta dan menutupi hutangnya sebesar US\$1,2 milyar.

Beberapa kasus di Indonesia seperti PT Lippo Bank dan PT Kimia Farma Tbk. juga berawal dari ditemukannya kecurangan pada pelaporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan pada kasus-kasus tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik atas laporan keuangan yang disajikan, sehingga diharapkan dengan penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan transparansi kinerja keuangan perusahaan (Boediono, 2005).

Pemerintah menanggapi permasalahan-permasalahan tata kelola perusahaan dengan menerbitkan regulasi KEP/31/M/EKUIIN/08/1999 tentang

pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate governance*. Kemudian pada tahun 2004 dikeluarkan pedoman GCG tentang perbankan dan tahun 2006 dikeluarkan pedoman GCG tentang perasuransian. Pada pelaksanaan GCG, pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa semakin diperlukannya GCG pada sektor publik. Pelaksanaan GCG pada sektor usaha tidak mungkin terwujud tanpa adanya *good public governance* dan partisipasi dari masyarakat. Sehingga pemerintah membentuk Komite Nasional *Corporate governance* (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Pembentukan KNKG ini menghasilkan pedoman *corporate governance* pada tahun 2006 (KNKG, 2006).

Indonesia menganut struktur dewan *two tier* yang memiliki dua tipe dewan pada struktur organisasinya yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi akan bertindak sebagai pengelola dari perusahaan sedangkan dewan komisaris bertindak sebagai pengawas di perusahaan (Darmadi, 2013). Karakteristik dewan direksi dan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan diantara dewan direksi akan menciptakan adanya perbedaan dalam bersikap, perspektif pemikiran, ide, ataupun nilai untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Menurut Post *et al.* (2011) mengutip Peng, dewan direksi akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Selain itu, dewan direksi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis, strategi internasional, strategi investasi penelitian dan pembangunan serta harga saham. Dewan direksi akan mempengaruhi arah dari strategi perusahaan. Saat ini, dewan direksi memiliki

keragaman yang tinggi terkait dengan umur, latar belakang etnik dan gender. Keragaman gender berupa jumlah wanita yang menduduki karir manajerial juga mengalami peningkatan yang signifikan. Keberagaman memberikan keuntungan pada perusahaan seperti perspektif yang berbeda untuk pengambilan keputusan, kreativitas dan inovasi (Darmadi, 2013).

Dewan direksi wanita dan laki-laki akan terlihat perbedaannya terutama dari segi alasan kepedulian. Menurut Malinowski dan Berger, wanita lebih sensitif dalam melaksanakan pekerjaannya, dewan direksi wanita akan lebih mampu untuk mengidentifikasi dilema moral pada pemasaran perusahaan (Post *et al.*, 2011). Gender yang beragam dapat meningkatkan informasi pengungkapan publik pada perusahaan besar dan koleksi informasi privat untuk perusahaan kecil (Gul *et al.*, 2011). Sehingga keberagaman gender dianggap dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Liu *et al.*, 2014). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan gender dewan direksi terhadap kinerja. Dewan direksi wanita maupun laki-laki dianggap memiliki pemikiran etika dan moral sesuai dengan sosialisasi tempat kerja dan aturan organisasional. Selanjutnya menurut Darmadi (2013) keberadaan wanita pada *top management* justru memiliki hubungan negatif dengan kinerja perusahaan. Penelitian juga membuktikan bahwa dewan direksi wanita tidak meningkatkan nilai perusahaan.

Hubungan antara karakteristik CEO dan kinerja keuangan dapat berkontribusi pada pengambilan kebijakan *corporate governance*. Pengambilan keputusan oleh CEO secara otonomi berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan (Adams & Feirerra, 2009). CEO memiliki pengaruh dalam

pengambilan keputusan saat terjadinya permasalahan keuangan, misalnya pada Royal Bank of Scotland, media massa menyebutkan bahwa keberadaan dan kewenangan CEO sangat besar dalam menentukan kebijakan strategis selama masa kedudukannya, sehingga berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan (Veprauskaite & Adams, 2013).

Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Adams *et al.* (2003) CEO yang sekaligus *founder* memiliki korelasi positif signifikan terhadap terhadap kinerja dan nilai perusahaan, tetapi masa jabatan CEO secara statistika tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Karakteristik manajerial selanjutnya yaitu kepemilikan saham pada perusahaan. Melalui kepemilikan manajerial pada saham perusahaan, terdapat anggapan bahwa pihak manajerial akan semakin bekerja keras dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan karena akan mendapat keuntungan dari hasil peningkatan tersebut (Veprauskaite & Adams, 2013). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hu and Zhou (2008) menyatakan bahwa manajer yang tidak memiliki saham pada perusahaan akan bekerja lebih baik. Hubungan kinerja dan kepemilikan manajerial pada penelitian ini bersifat *nonlinier*.

Selanjutnya, untuk permasalahan keagenan dalam perusahaan, komisaris independen sebagai dewan pengawas dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol. Dewan komisaris dapat menjadi mekanisme internal untuk mengontrol peluang manajemen sehingga dapat menyelaraskan antara kepentingan manajer dan pemegang saham. Keseimbangan dalam kebijakan dewan komisaris perlu ditunjang dengan keberadaan anggota komisaris yang independen untuk menjaga

independensi dan keseimbangan pengambilan keputusan (Nugrahini & Nugroho, 2010). Komisaris independen sebagai perwakilan dari para pemegang saham dan *stakeholder* diharapkan dapat menyelaraskan semua kepentingan dan membantu penerapan *good corporate governance* (Nugrahini & Nugroho, 2010).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wedari (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingginya jumlah komisaris independen terhadap kecurangan kinerja pada perusahaan. Hasil yang sama diungkapkan oleh Suropto (2012) presentase komisaris independen yang besar berpengaruh negatif terhadap diskresi akuntansi manajemen dalam pelaporan keuangan. Komisaris independen dapat bertindak sebagai pengawas untuk kualitas pelaporan keuangan. Perbedaan hasil diungkapkan oleh Wulandari and Budiarta (2014) keberadaan komisaris independen pada struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan non keuangan yang termasuk dalam pengumuman *Corporate Governance Perception Index* pada tahun 2010 sampai 2014. Penilaian GCG perusahaan di Indonesia dilakukan dengan program *Corporate Governance Perception Index*. Perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan program ini dianggap telah melakukan *corporate governance* dengan baik. Tahun pemilihan sampel yaitu 2010-2014 yang didasarkan pada Keputusan BAPEPAM dan UU No. 40 Tahun 2007. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Keuangan tentang penyampaian laporan tahunan bagi semua emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan keuangan harus disertai penerapan singkat *corporate governance* yang telah atau

akan dilaksanakan oleh perusahaan pada laporan tahunan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk laporan keuangan pada tahun buku pada akhir atau setelah 31 Desember 2006. Selain itu, penjabaran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang kesetaraan organ perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (OJK, 2014).

Motivasi dalam penelitian ini yaitu: pertama, semakin ketatnya pedoman dan peraturan terkait GCG di Indonesia namun kecurangan dan penyalahgunaan wewenang pada manajemen masih sering terjadi. Isu permasalahan tentang tata kelola perusahaan selalu muncul pada kasus kecurangan laporan keuangan seperti yang terjadi pada PT Bank Lippo tbk, PT Kimia Farma tbk dan PT Waskita Karya Persero. Kedua, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan penelitian terdahulu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu:

- 1.2.1. Apakah dewan direksi wanita berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- 1.2.2. Apakah masa jabatan CEO berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- 1.2.3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- 1.2.4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- 1.3.1. Mengetahui pengaruh dewan direksi wanita terhadap nilai perusahaan.
- 1.3.2. Mengetahui pengaruh masa jabatan CEO terhadap nilai perusahaan.
- 1.3.3. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
- 1.3.4. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu:

- 1.4.1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pengelolaan *good corporate governance* agar sesuai dengan peraturan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- 1.4.2. Bagi regulator, diharapkan penelitian ini memberikan informasi untuk penyusunan aturan-aturan yang tepat untuk pelaksanaan dan terwujudnya *good corporate governance*.
- 1.4.3. Bagi akademisi, diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberi kontribusi ilmu terkait dengan penelitian ini.

## 1.5. Sistematika Penelitian

### Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah secara garis besar mengenai isu permasalahan dan faktor-faktor *corporate governance* yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu terdapat ringkasan penelitian sebelumnya, motivasi penulis melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### Bab 2 : Landasan Teori

Berisi tentang landasan teori penelitian yaitu konsep *good corporate governance* yang meliputi gender, masa jabatan CEO, kepemilikan saham manajerial, komisaris independen dan nilai perusahaan. Bab ini juga menjelaskan tentang penelitian sebelumnya dan kerangka konseptual.

### Bab 3 : Metodologi Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan perhitungan statistik model regresi linier berganda. Penelitian mengambil sampel yaitu perusahaan nonkeuangan yang masuk dalam pengumuman *Corporate Governance Perception Index* dan terdaftar di BEI dengan tahun pemilihan sampel 2010-2014.

### Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi statistik hasil penelitian, model analisis regresi linier berganda dan



pengujian hipotesis. Bab ini juga berisi pembahasan tentang pengaruh dewan direksi wanita, masa jabatan CEO, kepemilikan manajerial dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

#### Bab 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

